

www.migrantcare.net

NEWSLETTER MIGRANT CARE

EDISI JULI - DESEMBER 2014

***Pemerintahan Baru & Harapan Baru
Perlindungan Buruh Migran?***

***Memberantas
Mafia Trafficking,
Rudy Soik malah
Dikriminalisasikan***

Merancang Sinergi Mutualisme

**Antara Akademisi & Aktivis
Yang Bekerja Untuk Advokasi
Perlindungan Buruh Migran Indonesia**



**Presiden Joko Widodo Harus Mengagendakan
Perlindungan Buruh Migran di ASEAN Summit**



MIGRANT CARE

Perhimpunan Indonesia
untuk Buruh Migran Berdaulat

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab
Anis Hidayah

Redaktur Pelaksana
Indah Utami

Anggota Redaksi
Humairoh
Nurharsono
Siti Badriyah
Musliha
Syaipul Anas
Bariyah
Eka Ernawati

Editor
Anis Hidayah

Redaksi Newsletter mengundang seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat atau gagasan dalam bentuk tulisan (makalah, artikel, essay, feature) berkaitan dengan buruh migran di Newsletter Migrant CARE.

Tulisan juga akan di muat di website
www.migrantcare.net

Alamatkan tulisan anda ke:

Migrant CARE

Jl. Perhubungan VIII No 52 RT/RW
001/007 Kel.JatiKec. Pulogadung
Jakarta Timur 13220

Telp/Fax: 021-29847581

E-mail:

secretariat@migrantcare.net

Pengantar Redaksi

Salam buruh migran,

Pembaca yang berbahagia Selamat Hari Buruh Migran Sedunia dan selamat bagi Migrant CARE yang sudah 10 tahun ini melakukan pembelaan hak-hak buruh migran Indonesia. 10 tahun berjuang bersama buruh migran menyongsong masa depan menjadi tema peringatan 10 tahun Migrant CARE. Peringatan ini juga bersamaan dengan diresmikannya Rumah Kita sebagai kantor baru Migrant CARE di Kuala Lumpur, Malaysia.

Edisi kali ini juga bertepatan dengan terbentuknya Pemerintahan Baru di bawah pimpinan Jokowi - JK. Visi nawacita negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara diharapkan akan menjadi platform bagi pembaruan kebijakan migrasi di Indonesia. Visi ini memberikan setitik harapan bagi rakyat Indonesia terutama buruh migran yang bekerja di luar negeri yang selama ini jauh dari perlindungan.

Ketidakhadiran negara juga tercermin dalam kriminalisasi aparat penegak hukum yang berupaya membongkar mafia perdagangan orang dalam penempatan buruh migran di NTT. Rudi Soik akan mengisi rubrik profil dalam edisi kali ini. Bagaimana dia berjuang dalam membongkar sindikat tersebut hingga ia mendekam di penjara?

Dalam topik kilas problematika buruh migran kami menyajikan, Kasus dua PRT migran yang meninggal secara mengenaskan di Hongkong serta kasus penipuan terhadap CTKI Taiwan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan Migrant CARE dalam upaya mensinergikan perlindungan buruh migran dengan bekerjasama membangun *Labour Desk/Help Desk* di Terminal Dua Keberangkatan untuk memantau buruh migran yang akan berangkat ke Timur Tengah. Kegiatan Workshop Akademisi yang digagas Migrant CARE merupakan langkah awal untuk merancang sinergi mutualisme antara Akademisi dan Aktivis yang bekerja untuk advokasi perlindungan buruh migran Indonesia.

Inilah beberapa rangkaian berita yang kami hadirkan untuk komunitas buruh migran dan pemerhati buruh migran Indonesia. Selamat Membaca.

Salam,

Daftar Isi

01 Pengantar Redaksi

FOKUS UTAMA:

Pemerintahan Baru & Harapan Baru Perlindungan Buruh Migran? 03

OPINI KITA:

04 **Memberantas Mafia Trafficking, Rudy Soik malah dikriminalisasikan**

06 **Kilas Problematika Buruh Migran:**

Berikan Keadilan Bagi Dua PRT Migran Korban Mutilasi di Hong Kong dengan Modus Penempatan

KEGIATAN MIGRANT CARE:

Strategic Planning Migrant CARE 2015-2019 07

08 **Merancang Sinergi Mutualisme Antara Akademisi dan Aktivis**

Yang Bekerja Untuk Advokasi Perlindungan Buruh Migran Indonesia

"Rumah Kita", Migrant CARE di Malaysia 09

Audiensi Migrant CARE-Angkasa Pura II: 10

Urgensi Labour Desk di Terminal Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta

11 **Monitoring Parlemen, Memastikan Revisi UU No 39/2004 Masuk Prioritas Prolegnas**

13 **Refleksi Hari Buruh Migran Internasional 2014**

13 **Malam Budaya Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia:**

Saatnya Negara Hadir Melindungi Buruh Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya

Direktur Eksekutif Migrant CARE Menerima Yap Thian Hien Award 15

STATEMENT MIGRANT CARE:

16 **Pernyataan Sikap Migrant CARE:**

Presiden Joko Widodo Harus Mengagendakan Perlindungan Buruh Migran di ASEAN Summit

Media Release Forum Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Kebijakan Luar Negeri Merespon Pertemuan G20 17

"Pertumbuhan Ekonomi Tidak Menjawab Semua Masalah Sosial, Ekonomi dan Lingkungan"

19 **Statement Migrant CARE Menyambut Peluncuran GLOBAL SLAVERY INDEX 2014**

Selamatkan Buruh Migran Indonesia Dari Perbudakan Modern!!

Siaran Pers Migrant CARE Memperingati Hari Buruh Migran Sedunia 2014 21

Saatnya Negara Hadir Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia & Anggota Keluarganya

FOKUS UTAMA

Pemerintahan Baru & Harapan Baru Perlindungan Buruh Migran?

Tanggal 20 Oktober 2014 Pemerintahan SBY-Budiono telah berakhir dan berganti dengan Pemerintahan Baru Jokowi-JK. Apakah selama Pemerintahan SBY-Budiono sudah membawa perubahan Indonesia yang signifikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Indonesia? Tentunya ini menjadi pertanyaan besar karena selama dua periode menjabat, di berbagai kesempatan pada event-event besar internasional, Presiden SBY selalu menunjukkan prestasi-prestasi tentang keberhasilannya yang telah membawa Indonesia sebagai negara yang mampu keluar dari ketertinggalannya. Namun kondisi riil yang terjadi adalah tidak ada upaya signifikan dari pemerintahan SBY untuk melindungi 6.5 juta buruh migran Indonesia (90 persennya perempuan yang bekerja di sektor domestik) yang bekerja di luar negeri.

Catatan Migrant CARE menyebutkan sepanjang pemerintahan SBY, setiap tahun angka kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dan kematian buruh migran juga terus meningkat secara massif. Tidak adanya upaya signifikan dari pemerintah untuk melindungi mereka dari kerentanan baik dalam bentuk kebijakan dan pelayanan. Bahkan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri yang menjadi basis legitimasi kebijakan buruh migran cenderung diskriminatif dan melegalkan praktek pengambilan keuntungan perusahaan jasa pengarah tenaga kerja Indonesia.



Sumber Foto: inspirationtravel.blogspot.co.id

Dengan dilantiknya Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke tujuh dan Bapak Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, diharapkan memberikan harapan baru untuk rakyat Indonesia. Hal ini muncul seiringan dengan visi pemerintahan baru untuk perlindungan buruh migran yang tertuang dalam Sembilan Agenda Prioritas yang disebut juga sebagai NAWACITA “Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”.

Misi Pemerintahan Baru dalam perlindungan buruh migran antara lain akan mengupayakan perbaikan kesejahteraan buruh migran melalui legislasi atau peraturan perundang-undangan untuk Revisi UU No. 39 Tahun 2004, Harmonisasi Konvensi Migran PBB 1990, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pemberantasan Trafficking, pembatasan dan pengawasan peran swasta, menghapus semua praktik diskriminatif terhadap buruh migran terutama buruh migran perempuan, serta me-

nyediakan layanan publik bagi buruh migran yang mudah dan aman sejak rekrutmen, selama di luar negeri, hingga pulang kembali ke Indonesia, serta memberikan bantuan hukum gratis bagi buruh migran yang menghadapi masalah hukum.

Dari deretan misi perlindungan buruh migran Indonesia yang tertuang dalam NAWACITA,

Migrant CARE yang tergabung dalam Gerakan Perempuan anti Pemiskinan mendesak Pemerintahan Baru di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla untuk memastikan janji-janji yang tertuang dalam visi-misi NAWA CITA terwujud dalam revisi RPJMN 2014-2019. (*Indah*)



Kemiskinan, tidak adanya lapangan pekerjaan, minimnya upah, adalah salah satu dari sekian permasalahan di negeri ini yang akhirnya memaksa masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk mempertaruhkan hidupnya pergi ke luar negeri, dan tidak sedikit yang pada akhirnya menjadi korban perdagangan manusia atau *human trafficking*. Ketiadaan aturan perlindungan yang berpihak terhadap buruh migran Indonesia, mengakibatkan sulitnya akses keadilan bagi korban.

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi di mana banyak terjadi kasus-kasus perdagangan manusia atau *human trafficking*. Tidak sedikit korban adalah anak di bawah umur dan perempuan. Korban rata-rata ditipu oleh calo/sponsor dengan diiming-imingi gaji yang besar dan kerja yang nyaman. Nirmala

OPINI KITA

Memberantas Mafia Trafficking, Rudy Soik malah Dikriminalisasikan

Bonat, Wilfrida Soik adalah salah satu korban perdagangan manusia, dari sekian banyak korban di NTT.

Adalah Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik, merupakan salah satu anggota satgas khusus untuk memberantas trafficking di NTT, berusaha membongkar kasus perdagangan manusia yang terjadi di daerahnya. Brigadir Rudy Soik membongkar kasus mafia trafficking yang terjadi di NTT, di mana 52 orang akan diselundupkan menjadi buruh migran ke Malaysia, namun Rudy Soik justru diberhentikan secara sepihak. Brigpol Rudy Soik dijadikan sebagai tersangka atas dugaan kasus penganiayaan terhadap Ismail Paty Sanga yang diduga terlibat dalam jaringan trafficking, dan Rudy Soik didakwa dengan pasal penganiayaan (351 ayat 1 KUHP), dengan ancaman 2,8 bulan penjara.

Kriminalisasi terhadap Rudy Soik diindikasikan dimulai ketika Rudy Soik dan timnya sedang dalam usaha mencari Tony Seran, pelaku jaringan perdagangan manusia yang masuk

dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda NTT. Ketika Rudy bersama timnya meminta Ismail P. Sanga untuk menunjukkan bukti keberadaan Tony, Ismail berusaha mengelabui keberadaan Tony, dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Akhirnya pada malam itu terjadilah tindakan yang dianggap sebagai kekerasan oleh Rudy Soik terhadap Ismail. Kejadian inilah yang kemudian menjadikan Rudy tersangka, walaupun semua itu adalah bagian dari tugasnya untuk mengungkap praktik *human trafficking* atau perdagangan manusia NTT.

Dengan didampingi oleh kuasa hukum yang diberikan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Anti Perdagangan Manusia (Amasiaga) yang terdiri dari berbagai lembaga dan masyarakat sipil, termasuk di dalamnya adalah Migrant CARE, Rudy Soik melawan kriminalisasi pada dirinya. Menurut Asfinawati salah seorang penasihat hukum Rudy Soik, kasus penganiayaan yang dituduhkan kepada Rudy adalah kasus yang ajaib, karena dibuat secara tergesa-gesa. Kejadian yang dituduhkan berlangsung pada tanggal 29 November ketika Rudy bersama tim Satgas pemberantasan *trafficking* sedang menjalankan tugasnya. Sementara laporan polisi dibuat pada tanggal 7 Desember, di mana antara kejadian dan pelaporan ada rentang waktu yang cukup singkat, serta proses visum yang cukup kilat yang hanya memakan waktu 25 menit.

Kriminalisasi terhadap Rudy Soik semakin kuat adalah ketika para pendamping Rudy berada di NTT untuk mengikuti sidang, banyak sekali ancaman-ancaman yang terus bergulir ke tim pengacara Rudy Soik. Pada sidang pertama contohnya, saat selesai sidang pertama yang hanya berlangsung 30 menit, mobil yang ditumpangi oleh tim pengacara terus diikuti oleh mobil hitam tanpa plat nomor, dan beruntung tim pengacara dan pendamping dapat meloloskan diri. Begitu juga pada saat sidang-sidang berikutnya ancaman dari wajah-wajah tidak dikenal dan termasuk Jhon seorang yang diduga terlibat jaringan mafia *trafficking* mem-

buat ancaman terhadap pendamping Rudy Soik di depan ruang sidang pada saat sidang belum dimulai hingga sidang sudah selesai.

Hingga saat ini sidang terhadap Rudy Soik masih belum selesai. Menurut tim pendamping Rudy yang tergabung dengan Amasiaga, tim pendamping akan menghadirkan 2 orang saksi ahli pada sidang ke-7 nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015. Saksi ini akan memperkuat Rudy dalam kegagalan hasil visum juga kegagalan proses BAP yang dilakukan terhadap Rudy. Dari hasil pertemuan tim Amasiaga dengan Rudy di LP, masih terlihat semangat yang tinggi dan berapi-api keinginan Rudy untuk membongkar mafia *trafficking* meskipun segalanya akan dipertaruhkan.

Kriminalisasi Rudy Soik adalah bukti bahwa hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Masyarakat Indonesia dan rakyat butuh perlindungan dan aturan yang jelas serta penegakan aturan tanpa terkecuali. Pada kenyataan hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Peradilan menjadi sangat mahal dan tidak dapat dirasakan oleh pencari keadilan bagi yang miskin dan lemah. Adalah benar *"Why the haves come out ahead?"* (Mengapa hanya orang berduit saja yang bisa mengakses lembaga peradilan?) (Marc Galanter: 1976 dalam Frans Rengka: 2007:5).

Rudy Soik hanya salah satu polisi yang berani mempertaruhkan posisi dan jabatannya demi terhapusnya *human trafficking* di NTT. Pemberantasan mafia *trafficking* masih jauh dari harapan, semakin marak perdagangan manusia. Jika kecepatan penanganan kasus *trafficking* secepat penanganan terhadap Rudy Soik mungkin akan lebih baik, masih banyak kasus yang lebih besar tapi lambat penanganannya. Ini berbeda dengan kasus Rudy yang diduga melakukan pemukulan, tapi penanganannya terkesan sangat cepat dan terburu-buru. (Eka Ernawati)

KILAS PROBLEMATIKA BURUH MIGRAN

Berikan Keadilan Bagi Dua PRT Migran Korban Mutilasi di Hong Kong

Bulan November 2014, dua PRT Migran yang bekerja di Hong Kong ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, mereka ditemukan dalam kondisi tubuh yang meninggal dunia di sebuah Apartemen milik seorang Bankir asal Inggris, Rurik George Caton Jutting (29), di Distrik Wan Chai, Hongkong. PRT Migran tersebut diketahui bernama Sumartiningsih (25) asal Dusun Grumbul Banaran RT2 RW5, Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Seneng Mujiasih alias Jessie Lereno Ruri (30) asal Desa Sidomakmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Jasad Seneng Mujiasih ditemukan di sofa apartemen itu, sedangkan jasad Sumartiningsih ada di dalam koper, di balkon apartemen yang sama. Penemuan kedua jasad ini, terjadi pada Sabtu 1 November 2014.



Menurut keterangan Suratmi (49) ibunda Sumartiningsih, anaknya pertama kali berangkat untuk menjadi PRT migran pada tahun 2011 dan sempat pulang pada tahun 2013. Sumartiningsih kembali berangkat ke Hong Kong sebagai buruh migran setelah mengikuti kursus sebagai *Disc Jockey* (DJ) di Jakarta dan Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2014 dirinya juga sempat pulang dan kembali berangkat pada tanggal 2 Agustus 2014. Sekarang kabar yang didapat keluarganya, Sumartiningsih meninggal dibunuh orang. Keluarga berharap agar pembunuh Sumartiningsih dapat dihukum seberat-beratnya.

Seneng Mujiasih adalah bungsu dari dua bersaudara pasangan transmigran asal Sleman, Yogyakarta, Mujiharjo (54) dan Jumineng (55). Saat merantau ke Hong Kong sejak tahun 2007, Seneng Mujiasih pulang ke kampung halaman-

nya di Muna Barat pada tahun 2009 sebelum Lebaran. Saat kepulangannya tersebut Seneng Mujiasih mengurus administrasi di daerahnya untuk kembali bekerja ke Hong Kong. Hingga pada akhirnya pihak keluarga mendapat kabar mengenai meninggalnya Seneng Mujiasih. Mendengar kabar duka tersebut, ibunya *shock* dan sering pingsan jika mengingat korban.

Saat ini, Rurik George Caton Jutting yang diduga sebagai pelaku pembunuhan sadis itu telah ditangkap kepolisian Hong Kong. Rurik George Caton Jutting dihadapkan ke pengadilan di wilayah timur Hong Kong.

Jenazah Sumartiningsih tiba di kampung halamannya Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu dini hari, 12 November 2014. Sedangkan Jenazah Seneng Mujiasih tiba di rumah duka Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 November 2014 pukul 18.00 WITA. Jenazah Sumartiningsih dan Seneng Mujiasih disambut haru orang tua dan kerabat dan langsung dibawa ke tempat pemakaman yang tidak jauh dari rumah duka. Jenazah mereka berdua dipulangkan setelah proses forensik Kepolisian Hong Kong selesai. Migrant CARE mendesak pemerintah Indonesia agar mengawal proses hukum terhadap pelaku, sehingga kedua korban mendapatkan keadilan.

(Indah)

KEGIATAN MIGRANT CARE



Strategic Planning Migrant CARE 2015-2019

Migrant CARE sebagai lembaga yang *concern* terhadap perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya bersama mitra kerja dan jaringan terus berupaya melakukan advokasi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan yang menjamin pemenuhan hak-hak buruh migran baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Berbagai upaya terus dikembangkan agar wacana keadilan global bagi buruh migran bisa digapai. Seiring dengan perkembangan permasalahan yang

dihadapi buruh migran, Migrant CARE sebagai organisasi jaringan juga dihadapkan pada tantangan-tantangan baru terutama yang berkaitan dengan pengembangan organisasi dan kapasitasnya agar senantiasa dapat menjalankan peran strategis dan menetapkan arah-arrah strategis ke depan baik menyangkut program dan pengembangan kelembagaan. Untuk menjawab peluang dan tantangan baik internal maupun eksternal Migrant CARE menetapkan dua isu strategis, yaitu:

1. Isu strategis untuk advokasi buruh migran:

- 1.1. Perwujudan Tata Kelola Migrasi Aman (*Save Migration*).
- 1.2. Advokasi amandemen perundang-undangan untuk mewujudkan migrasi aman.
- 1.3. Penanganan kasus dan bantuan hukum kepada buruh migran.
- 1.4. Pengorganisasian dan penguatan kesadaran kritis buruh migran.

2. Isu strategis penguatan kapasitas organisasi dan kelembagaan Migrant Care:

- 2.1. Pengembangan struktur dan sistem-sistem internal organisasi Migrant CARE.
- 2.2. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia (SDM).
- 2.3. Pengembangan Migrant CARE menjadi pusat rujukan (*Knowledge Centre*) terkait buruh migran.
- 2.4. Pengembangan kebijakan dan sistem untuk keberlanjutan organisasi Migrant CARE.

(Humairoh)

Merancang Sinergi Mutualisme Antara Akademisi & Aktivis Yang Bekerja Untuk Advokasi Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Pada tanggal 16-17 Desember 2014, Migrant CARE menyelenggarakan Workshop Temu Akademisi yang bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta. Workshop ini menghadirkan 35 akademisi yang bergiat dalam pengkajian buruh migran Indonesia dari Australia, Singapura dan Malaysia serta dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia serta kalangan aktivis yang selama ini bekerja untuk advokasi buruh migran Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Peringatan 10 Tahun Migrant CARE dan Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia.



Acara ini digagas karena selama ini kajian mengenai migrasi tenaga kerja belum menjadi perhatian serius dunia akademik Indonesia. Kalaupun ada, kajian tersebut masih menginduk pada studi kependudukan atau kajian kewilayahan. Hanya ada beberapa akademisi (terutama ilmu-ilmu sosial) di Indonesia yang serius menekuni kajian tentang migrasi tenaga kerja dan berinteraksi langsung dengan pelaku-pelaku advokasi buruh migran Indonesia.

Wahyu Susilo dari Migrant CARE mengatakan, "Bagaimanapun juga kekayaan pengetahuan yang kami dapat dari tiap hari kami menangani kasus dan berinteraksi dengan pejabat, makin dilengkapi dengan analisis dengan teman-teman yang bekerja di akademisi. Kami berharap pertemuan ini bukan pertama dan terakhir, tapi merupakan langkah awal, bagaimana membangun sinergi aktivis dan akademisi untuk advokasi buruh migran".

Dalam seminar sesi 1 mengenai isu-isu mutakhir migrasi tenaga kerja sebagai pembicara adalah Dr. Anisa Santosa berbicara tentang Buruh Migran Indonesia Dalam Framework ASEAN, Dr. Aris Arief Mundayat dari Universiti Putra Malaysia berbicara tentang Migrasi dan Pembangunan, dan Prof. Dr. Sulistyowatirianto dari Universitas Indonesia, Jakarta. Dalam seminar ini kompleksitas masalah migrasi tidak bergeser, semua aturan tidak dipatuhi baik oleh negara penerima maupun negara pengirim buruh migran, Masyarakat Ekonomi ASEAN masih menganggap bahwa buruh migran sebagai *non-skilled labour*, sehingga pentingnya rekomendasi untuk pemerintah Indonesia menjelang ASEAN Economic Community untuk menegosiasikan dengan Malaysia terkait isu perlindungan buruh migran termasuk *inclusive growth* dan *free mobility*. Dalam kajian berbasis feminis yang dilakukan oleh Prof. Sulis memperlihatkan perbudakan yang terjadi di negara Islam dan ber-*impact* pada tidak terpenuhinya akses keadilan bagi perempuan.

Seminar sesi 2 sebagai pembicara adalah Dr. Silvy Yazid berbicara tentang Peran CSO dalam Advokasi Buruh Migran, Dr. Aris Ananta berbicara tentang Migrasi dan Ekonomi Regional/Global, dan Prof. Dr. Ariel Heryanto berbicara tentang Diaspora Indonesia. Seminar sesi ini memperlihatkan adanya *gap* antara akademisi dan NGO yang selama ini terjadi, para akademisi dan praktisi selama ini berjuang secara terpisah sehingga bagaimana NGO mempengaruhi kebijakan luar negeri dan dalam negeri dan mengajak kita untuk berpikir tentang diaspora. Karena yang terjadi adalah buruh yang selama ini mengalami stigmatisasi. Dan isu buruh migran belum menjadi isu bersama.

Hadir pula dalam Workshop Temu Akademisi ini adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Bapak Hanif Dhakiri, beliau menyampaikan bahwa ada dua isu krusial yang harus segera diperbaiki dalam melindungi TKI di luar negeri yaitu tata kelola penempatan dan tata kelola perlindungan. Untuk tata kelola penempatan

dan perlindungan itu harus simpel, sederhana, cepat, dan harus murah, bahkan gratis.

Curah pendapat/gagasan merupakan sesi terakhir dalam Workshop Temu Akademisi sebagai pembicara adalah Wahyu Susilo dari Migrant CARE, dan Sri Palupi dari Institute for Ecosoc Right serta curahan pendapat dari beberapa yang hadir dalam workshop ini yang menghasilkan beberapa catatan antara lain:

- Melakukan pemetaan/ riset awal yang sudah ada dan mencoba membuat kategorisasi tema tentang apa dan memeriksa tema itu berangkat dari sebuah perspektif apa?
- Perlunya duduk bersama untuk melakukan kajian yang lebih seksama karena akademisi butuh input dan advokator juga membutuhkan input.
- Ada satu pendekatan yang selama ini jarang dipakai dalam buruh migran yakni pendekatan anti korupsi.
- Pentingnya jurnal migrasi.
- Penulisan dan pendokumentasian.

(Indah)

Rumah Kita, Migrant CARE di Malaysia

Dalam rangka mengoptimalkan advokasi penegakan hak-hak buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya dan memperkuat jaringan di tingkat regional dan global, Di tahun 2015 Migrant CARE membuka kantor di Kuala Lumpur, Malaysia. Lokasi kantor dipilih yang strategis dengan transportasi publik yang mudah dijangkau oleh buruh migran di Malaysia. Kantor baru disebut dengan "Rumah Kita". Di "Rumah Kita" kita bisa berkumpul untuk berdiskusi saling bertukar informasi dan bahkan bercerita suka duka bekerja di negara penempatan. Beralamat di kompleks DAMAI No. 4C, Kuala Lumpur, Malaysia. Lokasi ini mudah dijangkau karena dekat dengan stasiun monorel Titiwangsa dan terminal bus Titiwangsa, sehingga memudahkan bagi BMI yang

ingin melakukan pengaduan ataupun sekedar berkunjung ke "Rumah Kita". Sebenarnya, advokasi kasus dan bantuan hukum bagi BMI di Malaysia sudah berjalan lama sebelum adanya "Rumah Kita". Alex Ong adalah aktivis HAM warga negara Malaysia yang mengabdikan diri untuk memperjuangkan hak-hak WNI yang bekerja di Malaysia, selama ini, beliau memperjuangkan hak-hak BMI dan keluarganya di negara penempatan (Malaysia).

Untuk memperkuat perspektif dan kesadaran kritis buruh migran tentang hak-haknya sebagai pekerja, Migrant CARE Malaysia berupaya membangun jaringan-jaringan BMI yang ada disana dengan membentuk kelompok-kelompok paguyuban berdasarkan daerah asal,

jenis pekerjaan, dan wilayah kerja. Dalam hal ini, pertemuan-pertemuan untuk diskusi dan *sharing* dengan BMI menjadi agenda mingguan Migrant CARE Malaysia. Sementara itu, dalam penanganan kasus BMI, Migrant CARE Malaysia sudah bekerjasama dengan sesama LSM yang ada di Malaysia seperti TENAGANITA. Selama bulan Januari 2015 sampai Mei 2015, ada 39 data kasus masuk yang ditangani “Rumah Kita”, kasus-kasus yang masuk di antaranya meninggal dunia, gaji tidak dibayar, kekerasan/penganiayaan, sakit, *trafficking*, pemalsuan dokumen, penipuan, dan *over stay*.

Pengaduan kasus-kasus tersebut melalui sambungan telepon, sms, email, korban yang datang langsung ke kantor atau tim kita sendiri yang mendatangi korban (untuk kasus yang sakit).

Migrant CARE Malaysia juga melakukan pendampingan korban ke KBRI, seperti pendampingan mediasi, pendampingan pengurusan dokumen (SPLP/Paspor) dan pendampingan pengurusan Cek Out Memo (COM). (Ika Masrurah)



Audiensi Migrant CARE - Angkasa Pura II: Urgensi *Labour Desk* di Terminal Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta

Migrant CARE sangat mengapresiasi KPK yang telah menghapuskan terminal kepulangan TKI Terminal Selapanjang, hal ini disampaikan oleh Anis Hidayah, Direktur Migrant CARE saat mengawali audiensi Migrant CARE dengan Angkasa Pura II tanggal 24 November 2015 di Auditorium Angkasa Pura II. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Utama Angkasa Pura II, Senior General Manager Angkasa Pura II, beserta Jajaran Direksi.

Anis juga menyampaikan setelah dihapuskannya Terminal Selapanjang tidak membuat persoalan berkurang tetapi masih banyak ditemukannya modus pemerasan buruh migran. Salah satunya, adanya perlakuan berbeda yang didapatkan buruh migran ketika pesawat mereka tiba di bandara. Para buruh migran ini digiring untuk melakukan transaksi di *money changer* tentu dengan harga yang jauh dibawah dari kurs yang ada. Dari persoalan yang masih banyak itu, Migrant CARE mengusulkan sebuah *help desk* atau *labour desk* di mana para buruh migran bisa mendapatkan informasi baik itu tentang administrasi, visa, keberangkatan, dan informasi lainnya, sehingga masalah bisa di deteksi lebih awal.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Utama Angkasa Pura II, beliau menyampaikan bahwa masih banyak *money changer* gelap yang beroperasi di Bandara Soekarno Hatta namun sudah ditindaklanjuti. Beliau juga menambahkan bahwa KPK dan UKP4 selalu intensif datang ke Angkasa Pura setelah Terminal Selapanjang disidak ini terkait permasalahan TKI di bandara. Dari hasil sidak tersebut pihak Angkasa Pura II sudah merubah beberapa prasarana TKI diganti dengan konsep TKI mandiri.

Beberapa perubahan perbaikan tata kelola yang dilakukan Angkasa Pura II adalah pembentukan Satgas pengamanan TKI dan



perbaikan fasilitas TKI seperti: Penyediaan *Common Use Lounge* dengan layanan terintegrasi, penyediaan counter pelayanan informasi dan pengaduan tenaga kerja (*Help Desk*) dan perbaikan dan penambahan *signage* untuk kemudahan informasi TKI.

Mengenai pendirian *help desk*, Angkasa Pura II sangat mengapresiasi asal untuk kebaikan, tidak ada penyelewengan dan sesuai dengan fungsi dan perannya. Dalam hal ini Angkasa Pura II sebagai operator dan meminta Migrant CARE untuk terus memonitor jika ada hal-hal yang tidak sesuai. (Indah)

Monitoring Parlemen, Memastikan Revisi UU No 39/2004 Masuk Prioritas Prolegnas

Sepanjang bulan Oktober hingga Desember 2014, Migrant CARE secara rutin melakukan pemantauan sidang-sidang parlemen di DPR RI. Pemantauan ini untuk mengawal proses Revisi UU No. 39 Tahun 2004 dan mendesakkan juga pembahasan RUU PRT menjadi agenda Prolegnas 2015. Dari pantauan yang selama ini dilakukan diantaranya adalah Pemantauan Rapat Paripurna DPR tanggal 16 Oktober 2014 yang menghasilkan bahwa DPR RI periode 2014-2019 telah menetapkan alat kelengkapan DPR berjumlah 11 Komisi.



Fragmentasi politik di Senayan yang cukup kuat, memicu situasi yang tidak kondusif di DPR RI namun dengan merespon kebijakan pemerintahan Bapak Jokowi-JK, dalam NAWACITA nya “Negara hadir dalam perlindungan warga negara Indonesia khususnya pekerja migran”, maka Migrant CARE memandang pentingnya untuk berkontribusi agar pembahasan revisi UU/39/2004 di DPR RI periode tahun 2014-2019, dapat menghasilkan perbaikan-perbaikan secara substantif, ini terlihat dari hasil pemantauan rapat-rapat di DPR di antaranya adalah:

1. Adanya agenda Baleg (Badan Legislasi DPR) yang memasukkan revisi UU 39/2004, RUU PPRT menjadi agenda Prolegnas Baleg 2015.
2. Komisi IX DPR RI memasukkan revisi UU No.39/2004, RUU PRT menjadi agenda Prolegnas 2015.
3. Adanya draft kebijakan untuk mengganti KTKLN dan Kementerian Tenaga Kerja.
4. Adanya draft dokumen evaluasi biaya penempatan TKI Korea agar ditinjau ulang guna menekan biaya penempatan.

Berakhirnya Prolegnas tahun 2014 yang menghasilkan Draf RUU PPILN dan menjadi Hak Inisiatif Komisi IX DPR RI, dan juga telah membentuk TIM Pengawas Perlindungan TKI (TIMWAS TKI) yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan TKI dan mendorong penuntasan pembahasan RUU PPILN masih pada pembahasan tingkat I sehingga masih banyak yang harus dilakukan dalam upaya mengawal revisi UU/39/2004 pada Prolegnas 2015. *(Indah)*

Refleksi Hari Buruh Migran Internasional 2015

Hari Buruh Migran Internasional, 18 Desember merupakan hari besar bagi para buruh migran sedunia yang telah di rayakan oleh segenap buruh migran. Setiap tahun, pada tanggal 18 Desember berbagai macam kegiatan dilakukan untuk merayakan hari perayaan bagi buruh migran internasional sebagai simbol rasa peduli dan penuh harap, agar pemerintah lebih peka terhadap nasib para buruh migrant yang rela dan berani berjuang sampai ke luar negeri demi satu cita-cita, yaitu KESEJAHTERAAN.

Kesejahteraan dan kesetaraan bagi keluarga, dan orang-orang yang mereka sayangi agar keluarga mereka bisa hidup layak, sayangnya hari buruh migran internasional belum menjadi titik tolak perubahan kebijakan dan pelayanan oleh pemerintah Indonesia, seringkali hanya berupa seremonial.

Hari buruh migran internasional juga menjadi pengingat dan pekerjaan rumah bagi negara tentang kondisi para buruh migran

yang berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Aksi turun ke jalan demi memperoleh keadilan merupakan salah satu jalan untuk mengingatkan negara Indonesia tercinta ini. Pemerintah satu sisi menyebut buruh migran adalah pahlawan devisa, dan di lain sisi menempatkan dalam posisi yang lemah.

Minimnya keterbukaan informasi menjadi satu titik kelemahan para BMI, hal ini nampak dari simpang siurnya biaya penempatan, ketidakjelasan kontrak kerja, serta penempatan BMI yang justru tanpa di sadari oleh para buruh migran yang mengarah pada perdagangan manusia (*trafficking*), padahal sebuah informasi merupakan sesuatu yang vital karena dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan.

Menjadi buruh migran bukanlah menjadi pilihan saat ini, tetapi merupakan keterpaksaan akibat sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. (Miftah)

Malam Budaya Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia: Saatnya Negara Hadir Melindungi Buruh Migran Indonesia & Anggota Keluarganya

Dalam memperingati Hari Buruh Migran Sedunia yang jatuh pada tanggal 18 Desember dan bertepatan dengan ulang tahun yang ke-10, Migrant CARE menggelar acara Malam Budaya Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia dengan tema "Saatnya Negara Hadir Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia Beserta Anggota Keluarganya". Peringatan ini merupakan momentum penting bagi gerakan buruh migran global, tepatnya sejak PBB menetapkan



kan konvensi 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya.

Beberapa rangkaian kegiatan dalam acara yang diselenggarakan di Goethe Haus, Jakarta Pusat (18/12) adalah Tarian Selamat datang dari Penari Anak Komunitas ANBTI, dilanjutkan sambutan dari Migrant CARE, Doa Lintas Agama oleh Komunitas ANBTI dan kemudian acara Talkshow "Saatnya Negara Hadir Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia beserta Anggota Keluarganya", menghadirkan Nusron Wahid Kepala BNP2TKI, Yuniyanti Czuaifah Ketua Komnas Perempuan, Anis Hidayah dan sebagai moderatornya Cheryl Tanzil. Sementara itu, Anis Hidayah mengatakan, dalam acara ini untuk yang pertama kali Migrant CARE mengundang BNP2TKI "Setidaknya kita ini ada *trust* terhadap pemerintahan Jokowi-JK, ada komitmen komprehensif bahwa permasalahan buruh migran akan diperbaiki, negara akan hadir dalam permasalahan perlindungan buruh migran. Sebelumnya, tidak ada kemauan politik melihat masalah TKI ini sebagai persoalan hak asasi manusia, tetapi hanya bicara soal devisa".

Setelah acara Talkshow, ada beberapa rangkaian kegiatan lain yaitu panggung seni yang diisi oleh, Melanie Soebono Duta Anti

Perbudakan Modern, Tarian Dayak oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Orasi Budaya oleh Prof. Sulystiowati Irianto (Dewan Penasehat PKWG UI) tentang Akses Keadilan Perempuan dan Migrasi Global. "Mereka diinginkan, karena beragama sama, rajin bekerja, patuh, dan mau dibayar murah. Akan tetapi dalam waktu yang sama mereka ditempatkan sebagai orang yang berbeda, di-liyan-kan, diberi stereotip dan stigma sebagai perempuan murahan, terbelakang, dan bodoh. Hanya karena mereka berasal dari ras, etnik, bangsa, kelas yang berbeda, dan perempuan". Kutipan pembukaan Orasi Budaya Prof Sulis yang menggambarkan bagaimana perempuan pekerja migran domestik diposisikan dalam bangunan identitas, dan struktur lapisan sosial dan budaya yang hirarkis di negara penerima, yang sekaligus adalah juga pasar global.

Migrant CARE menilai pentingnya untuk melakukan serangkaian aktifitas ini karena untuk merefleksikan kerja-kerja advokasi dalam pembelaan hak-hak buruh migran selama ini. Serangkaian kegiatan tersebut dimaksudkan untuk terus memperkuat daya pacu kami sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak asasi buruh migran.

(Indah)



Direktur Eksekutif Migrant CARE Menerima Yap Thiam Hien Award



Penyerahan penghargaan Yap Thiam Hien Award dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly bertempat di Galeri Nasional Indonesia, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE mendapat penghargaan dari Yap Thiam Hien Award. Yap Thiam Hien Award adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar dalam upaya penegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Dari 44 kandidat yang diusulkan masyarakat kepada dewan juri, nama Anis Hidayah terpilih sebagai penerima Yap Thiam Hien Award 2014. Penilaian dewan juri ini dikarenakan Anis Hidayah telah **memperlihatkan kegigihannya** dalam memperjuangkan nasib buruh migran Indonesia sehingga layak mendapatkan anugerah tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Yap Thiam Hien, Todung Mulya Lubis yang menyatakan bahwa Anis Hidayah merupakan sosok muda yang kritis dan berani, dan bersama Migrant CARE salah satu kasus yang pernah ditanganinya adalah kasus Ruyati, TKI yang terancam hukuman pancung di Saudi Arabia. Ruyati membunuh majikan

karena tidak tahan terus disiksa. Meskipun perjuangan Anis bersama Migrant CARE belum membuahkan hasil tetapi Anis terus konsisten dengan komitmennya terhadap penegakkan dan Advokasi Hak Asasi Manusia.

Selain itu, Anis Hidayah juga mendapatkan penghargaan Sarinah Award. Penganugerahan Sarinah Award diberikan kepada 10 perempuan Indonesia yang dianggap berprestasi, penganugerahan ini diberikan dalam rangka pelaksanaan Hari Ibu yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan. Anis Hidayah terpilih sebagai pemenang Sarinah Award kategori aktivis hukum. Penyerahaan penganugerahan dilakukan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri bertempat di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut hadir pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof. Yohana Susana Yambise dan tokoh lainnya. *(Indah)*

PERNYATAAN SIKAP MIGRANT CARE

Presiden Joko Widodo Harus Mengagendakan Perlindungan Buruh Migran di ASEAN Summit

Pada tanggal 11-13 November 2014, Presiden Joko Widodo menghadiri Pertemuan Puncak ASEAN (ASEAN Summit) di Nay Pyi Taw, Myanmar. Selain bertemu dengan 9 Kepala Negara/Kepala Pemerintahan anggota ASEAN lainnya, pertemuan puncak ini juga mengoneksikan ASEAN dengan pemimpin negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, China, India, Australia, New Zealand dan Amerika Serikat.

Tampaknya agenda soal ekonomi dan keamanan regional tetap mendominasi pembicaraan di pertemuan puncak ini, khususnya soal implementasi ASEAN Economic Community 2015. Sebaliknya, pembicaraan mengenai hak asasi manusia di kawasan ASEAN dipastikan sulit untuk diagendakan sebagai bahan pembicaraan yang signifikan mengingat Ketua ASEAN tahun ini adalah Myanmar, negara yang belum tuntas dalam penyelesaian masalah hak asasi manusia dan demokrasi. Dengan demikian, masalah buruh migran juga berpotensi “hilang” sebagai agenda penting dalam ASEAN Summit kali ini.

Situasi tersebut sudah tampak terbaca dari pidato pembukaan Ketua ASEAN (*Chair Statement*) U Thein Sein (<http://www.asean.org/news/asean-statement-communicues/item/statement-by-he-u-thein-sein-at-the-25th-asean-summit-opening-ceremony-12-november-2014-nay-pyi-taw>) yang sama sekali tidak menyebut persoalan buruh migran sebagai area prioritas ASEAN. Pengabaian soal buruh migran di ASEAN memperlihatkan bahwa ASEAN sama sekali tidak mengakui peran signifikan buruh migran dalam dinamika ekonomi di kawasan ASEAN. Berdasarkan data Bank Dunia Oktober 2014 (*Remittance and Development*), kawasan ASEAN merupakan kawasan yang makin tergantung dan ditopang oleh jerih keringat buruh migran kala sumber daya alam makin menyusut.

Oleh karena itu, Migrant CARE mendesak Presiden Joko Widodo untuk mendesak agenda perlindungan buruh migran menjadi agenda prioritas yang dibicarakan secara serius dalam ASEAN Summit. Presiden Joko Widodo harus mampu mencairkan kebekuan pembicaraan mengenai mekanisme perlindungan buruh migran. ASEAN Declaration on Promotion and Protection the Rights of Migrant Workers 2007 harus segera dioperasionalkan melalui ASEAN Commission on Protection Migrant Workers.

Presiden Joko Widodo juga harus mengagendakan pertemuan dengan kepala negara tujuan buruh migran Indonesia di ASEAN yang dalam hal ini Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam untuk memperbaiki kondisi perlindungan buruh migran Indonesia di kedua negara tujuan tersebut. Usulan ini merupakan salah satu cara untuk memastikan buruh migran tidak terpinggirkan menghadapi ASEAN Economic Community tahun 2015.

Jakarta, 12 November 2014

*MEDIA RELEASE FORUM MASYARAKAT SIPIL INDONESIA
UNTUK KEBIJAKAN LUAR NEGERI MERESPON PERTEMUAN G20*

Pertumbuhan Ekonomi Tidak Menjawab Semua Masalah Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Setelah menghadiri dua pertemuan internasional yaitu APEC dan ASEAN, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan puncak G20 yang berlangsung mulai hari ini (15/11) hingga besok (16/11) di Brisbane, Australia. Agenda pertemuan G20 seperti yang sudah dihasilkan di pertemuan-pertemuan pendahuluan tingkat menteri yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi global 2% dalam lima tahun mendatang. Pertumbuhan ekonomi akan diraih dengan cara meningkatkan investasi swasta terutama dalam perdagangan dan investasi di bidang infrastruktur, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi melalui kerjasama perpajakan dan penanganan anti korupsi. G20 mengasumsikan dengan adanya pertumbuhan akan menciptakan lapangan kerja.

Sudah bisa ditebak, Presiden Jokowi akan memaparkan visi poros maritim di dalam tersebut, seperti yang sudah disampaikan di dua pertemuan sebelumnya. Tentu saja, dilihat dari agenda dan juga visi yang di bawa Jokowi, pertemuan G20 sepertinya dapat memberikan solusi pembiayaan infrastruktur yang selama ini menjadi kendala pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Namun menurut Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar negeri (ICFP) hasil tersebut tidak cukup terutama dalam memecahkan masalah ekonomi Indonesia. Bahkan bisa jadi hanya akan menambah masalah di dalam negeri. Menurut Siti Khoirun Ni'mah, Program Officer INFID "Selama ini ekonomi dunia terlalu bertumpu pada pertumbuhan, sementara hasilnya ketimpangan ekonomi kian tinggi. Menurut OXFAM (2014), hampir setengah dari kekayaan dunia saat ini dimiliki oleh 1% dari populasi dunia dengan jumlah kekayaan sebesar \$110 triliun. Ini 65 kali dari total kekayaan setengah penduduk dunia. Demikian halnya kondisi di dalam negeri di mana terjadi percepatan ketimpangan selama sepuluh tahun terakhir yang tahun 2013 angka rasio ini mencapai 0,41. Sebuah angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ini menunjukkan, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja bukan untuk semua. Oleh karena itu, diharapkan Presiden Jokowi memberikan perhatian terkait dengan masalah tersebut bukan hanya sekedar membangun infrastruktur tetapi mendorong sistem ekonomi yang sanggup mengurangi ketimpangan dengan memberi kesempatan yang lebih besar masyarakat ekonomi lemah".

Pertumbuhan ekonomi dunia juga ditopang komodifikasi buruh murah dengan mengorbankan buruh migran. Komodifikasi buruh migran telah memberi sumbangan yang tidak sedikit bagi pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, buruh migran tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dan dibebani biaya remitansi yang sangat tinggi. Menurut Wahyu Susilo, dalam 5 tahun terakhir ini G20 memberi perhatian khusus pada masalah remitansi, karena aliran uang transnasional ini semakin signifikan diperhitungkan sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan. Namun hingga saat ini G20 tidak pernah mengagendakan persoalan perlindungan buruh migran yang mengalirkan remitansi tersebut. Hendaknya dalam pertemuan G20 ini, Presiden Joko Widodo berani mengajukan agenda perlindungan bu-

ruh migran sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembicaraan mengenai remitansi yang diagendakan dalam G20.

Pertumbuhan juga mengorbankan lingkungan dengan bertumpu pada ekstraktif industri. Atas nama pertumbuhan ekonomi, lingkungan dikorbankan. Eksploitasi sumber daya alam terjadi dimana-mana yang menyebabkan bencana lingkungan karena perubahan iklim. Sementara tahun ini, **G20 tidak memasukkan agenda perubahan iklim di dalam proses perundingan.** Irhas Ahmady dari WALHI menyesalkan pertemuan G20 tahun ini tidak membahas perubahan iklim. "Padahal salah satu sebab kegagalan perundingan perubahan iklim karena sikap keras kepala negara-negara maju yang tidak mau mengurangi emisinya. Seharusnya G20 menyusun peta jalan menuju perundingan perubahan iklim yang akan berlangsung di Paris tahun 2015. Namun ini tidak dilakukan".

Sementara itu, Maryati Abdullah, Koordinator Publish What You Pay Indonesia menyerukan agar negara-negara G20 melaksanakan praktek tata kelola yang transparan dan bersih dari korupsi dalam pelaksanaan pembangunan ekonominya. Sebagai negara ASEAN pertama yang telah meraih status "*compliant*" dalam EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menyerukan transparansi di sektor penerimaan dan pembayaran pajak di sektor migas, mineral dan batubara. Bukan saja di negara-negara di mana sumber daya tersebut berada (*host country*) namun juga di negara asal dari perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi. Transparansi pajak dan pembayaran sektor migas dan tambang dianggap urgent, terlebih ditengarai adanya praktek ilegal ekspor, terutama pada komoditas batubara serta mineral pertambangan dari wilayah Indonesia ke negara-negara tujuan di luar negeri. Sehingga, diplomasi maritim dan infrastruktur yang akan dilancarkan Indonesia seharusnya juga mampu mengatasi problem pengapalan ilegal bahan-bahan mineral dan tambang yang terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan tikus, maupun melalui dokumen pengapalan yang tidak benar.

Pemerintah juga seharusnya menyuarakan kepentingan perdagangan dari negara-negara miskin dan berkembang. Sekaligus memastikan adanya perlindungan yang cukup bagi pelaku ekonomi kecil seperti nelayan. Bukan hanya mendorong perdagangan bebas tanpa memperhatikan kerugian yang diderita. "Pemerintah harus memperhatikan usulan dari Ibu Susi, Menteri Perikanan dan Kelautan. Sebab selama ini Indonesia dirugikan dari sistem perdagangan yang tidak adil. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mempertimbangkan usulan Ibu Susi untuk keluar dari G20" Rachmi Hertanti, Indonesia for Global Justice (IGJ).

Ini merupakan kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk memberikan arah baru bagi tata ekonomi global dengan tidak hanya mengikuti agenda-agenda negara-negara maju. Namun memiliki posisi yang jelas yaitu menyuarakan kepentingan negara-negara miskin dan berkembang. Jika hal tersebut tidak dimungkinkan maka sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan untuk keluar dari G20.

Jakarta, 15 November 2014

Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri
(Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy/ICFP): **INFID, IGJ, WALHI, PWYP, WVI, PATTIRO, Migrant CARE, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia, Bina Desa, KPA, TII, YAPPIKA, IHCS.**

STATEMENT MIGRANT CARE
MENYAMBUT PELUNCURAN GLOBAL SLAVERY INDEX 2014

Selamatkan Buruh Migran Indonesia Dari Perbudakan Modern !!

Hari ini, 18 November 2014, organisasi global melawan perbudakan modern WALK-FREE (www.walkfree.org) meluncurkan Laporan Global mengenai Situasi Perbudakan Modern GLOBAL SLAVERY INDEX 2014 (www.globalslaveryindex.org). Secara khusus laporan ini akan diluncurkan secara bersamaan di Jakarta, Nairobi, Jordan, Wina, Perth dan London.

Tahun ini dilaporkan terjadi peningkatan korban perbudakan modern sebesar 20% dibanding tahun lalu. Menurut laporan perdana GLOBAL SLAVERY INDEX 2013 jumlah korban perbudakan modern mencapai 29,7 juta orang, maka di tahun 2014 ini meningkat menjadi 35,8 juta orang. Peningkatan ini tentu sangat menggelisahkan masyarakat internasional dan menyadarkan kita bahwa di masa peradaban modern ini masih berlangsung praktek keji perbudakan modern dalam bentuk eksploitasi buruh anak, buruh migran dan buruh perempuan, eksploitasi seksual anak dan perempuan serta pemaksaan perkawinan di bawah umur, dan masih berlangsungnya rantai pasok eksploitatif dalam produksi komoditi pangan, kosmetik, pakaian, jasa hiburan, sektor rumah tangga dan komoditi konsumsi lainnya.

Dimana posisi Indonesia? Situasinya juga tidak begitu menggembirakan. Jika dalam GLOBAL SLAVERY INDEX 2013 Indonesia berada pada ranking 114 dari 162 negara (dengan ukuran makin kecil angkanya makin memburuk situasinya) maka di tahun 2014 ini posisi Indonesia makin mengarah ke peringkat yang buruk menjadi 102 dari 167 negara (<http://www.globalslaveryindex.org/country/indonesia/>). Yang lebih memprihatinkan lagi, dalam GLOBAL SLAVERY INDEX 2014, Indonesia masuk sebagai 10 besar (tepatnya peringkat 8) negara dengan jumlah korban perbudakan modern terbanyak di dunia (dari 167 negara). Negara-negara yang masuk kategori ini adalah India, China, Pakistan, Uzbekistan, Rusia, Nigeria, Kongo, Indonesia, Bangladesh dan Thailand. Dalam jangka waktu satu tahun, jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern yang tercatat meningkat lebih dari 300%! Jika di tahun 2013 berjumlah 210,970 orang maka di tahun 2014 meningkat menjadi 714.300 orang.

Gambaran situasi perbudakan modern yang berlangsung di Indonesia dan dialami oleh warga negara Indonesia tidak jauh berbeda dari hasil pemantauan Migrant CARE. Secara khusus Migrant CARE masih menemukan praktek serupa perbudakan modern yang terjadi dalam skema penempatan buruh migran ke luar negeri. Jika dalam proses rekrutmen mereka dijemak dengan jeratan utang yang mencekik, di negara tujuan bekerja dieksploitasi bekerja tanpa istirahat yang cukup serta rentan mengalami tindakan kekerasan, pelecehan seksual dan perkosaan. Pada saat kepulangan juga masih menjadi obyek eksploitasi pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara tidak sah.

Selain di sektor rumah tangga, GLOBAL SLAVERY INDEX 2014 juga mencatat praktek serupa perbudakan modern di Indonesia dan terhadap warga negara Indonesia juga terjadi pada industri-industri yang menghasilkan komoditi kelapa sawit dan perikanan. Beberapa ornop Indonesia seperti WALHI, ELSAM dan Sawit Watch mencatat bahwa pertumbuhan industri kelapa sawit turut berkontribusi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk berlangsungnya praktek perbudakan modern pada buruh perkebunan kelapa sawit. Di sektor perikanan, ornop Indonesia yang bekerja untuk hak anak seperti PKPA dan Komnas Anak serta ornop Indonesia yang bekerja untuk advokasi sektor perikanan dan kelautan KIARA juga mencatat masih berlangsungnya pola penangkapan ikan dengan melibatkan anak-anak (sistem jermal) dan buruh kelautan dengan upah yang sangat rendah.

Migrant CARE juga mencatat bahwa penempatan buruh migran di sektor perkebunan dan kelautan juga sangat rentan eksploitasi dan praktek perbudakan modern. Jutaan warga negara Indonesia yang bekerja di perkebunan kelapa sawit nyaris tanpa perlindungan karena status mereka kebanyakan sebagai buruh migran tak berdokumen.

Sepanjang tahun 2013-2014, Migrant CARE juga mencatat terjadinya peningkatan kasus-kasus pelanggaran hak asasi buruh migran Indonesia yang bekerja sebagai pelaut. Hingga saat ini belum ada instrument khusus yang melindungi para buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor kelautan terutama di kapal-kapal penangkap ikan ber-bendera asing.

Atas situasi tersebut, Migrant CARE mendukung sepenuhnya rekomendasi WALKFREE yang ada dalam GLOBAL SLAVERY INDEX dengan mendesak agar:

1. Pemerintah Indonesia meratifikasi Kovnesi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga dan Protocol 2014 dari Konvensi ILO tentang Kerja Paksa serta segera mensyahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
2. Pemerintah Indonesia juga terbuka pada masyarakat sipil Indonesia dan masyarakat internasional untuk mewujudkan kesadaran publik mengakhiri perbudakan modern dan mendesak pada sektor untuk menerapkan norma dan standar bisnis yang menghormati hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender serta kelestarian lingkungan.

Selain itu, secara khusus Migrant CARE mendesak kepada Pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo untuk membuat peta jalan mengakhiri praktek perbudakan modern terhadap buruh migran Indonesia dengan:

1. Mengakhiri era penempatan buruh migran yang berbasis pada monopoli PPT-KIS dan berbiaya tinggi dan menggantinya dengan tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran sebagai aktivitas pelayanan publik.
2. Mengimplementasikan ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya sebagai instrumen diplomasi, panduan pembaharuan legislasi dan panduan kerja institusi negara yang terkait masalah penempatan dan perlindungan buruh migran.

Jakarta, 18 November 2014

SIARAN PERS MIGRANT CARE
MEMPERINGATI HARI BURUH MIGRAN SEDUNIA 2014

Saatnya Negara Hadir dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia & Anggota Keluarganya

Hari ini, 18 Desember 2014 diperingati sebagai hari buruh migran sedunia sejak PBB menetapkan Konvensi Internasional tahun 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini lahir dari sejarah perdebatan panjang di PBB untuk merespon kondisi perbudakan dan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa buruh migran di berbagai negara. Hingga saat ini, konvensi ini telah diratifikasi oleh 47 negara, termasuk Indonesia dan ditandatangani oleh 38 negara.

Selama 10 tahun pemerintahan SBY berkuasa meninggalkan warisan perbudakan yang sungguh nyata. Hal ini bisa dilihat dalam Global Slavery Index 2014, di mana tahun ini posisi Indonesia makin mengarah ke peringkat yang buruk menjadi 102 dari 167 negara (<http://www.globallslaveryindex.org/country/indonesia/>). Yang lebih memprihatinkan lagi, dalam GLOBAL SLAVERY INDEX 2014, Indonesia masuk sebagai 10 besar (tepatnya peringkat 8) negara dengan jumlah korban perbudakan modern terbanyak di dunia (dari 167 negara). Negara-negara yang masuk kategori ini adalah India, China, Pakistan, Uzbekistan, Rusia, Nigeria, Kongo, Indonesia, Bangladesh dan Thailand. Dalam jangka waktu satu tahun, jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern yang tercatat meningkat lebih dari 300%! Jika di tahun 2013 berjumlah 210,970 orang maka di tahun 2014 meningkat menjadi 714.300 orang.

Ti adanya upaya implementasi dari ratifikasi Konvensi Internasional tahun 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya selama 2 tahun lebih, membuktikan keputusan DPR dan Pemerintah Indonesia pada 12 April 2012 untuk meratifikasi konvensi buruh migran hanya pencitraan semata di mata masyarakat internasional. Kala itu Indonesia sebagai anggota dewan HAM PBB akan direview kondisi penegakan HAM-nya dalam mekanisme UPR (*Universal Periodic Review*). Oleh karena itu ratifikasi tersebut belum memiliki dampak signifikan bagi jaminan perlindungan HAM bagi buruh migran. Sampai saat ini pemerintah Indonesia tak kunjung melakukan harmonisasi konvensi tersebut dengan kebijakan nasional terkait buruh migran, terbukti UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan buruh migran hingga kini belum tuntas untuk direvisi.

Catatan Migrant CARE sepanjang tahun 2014 menegaskan bahwa kerentanan buruh migran Indonesia menghadapi perbudakan dan pelanggaran HAM secara sistematis belum bergeser secara signifikan. Erwiana adalah salah satu bukti korban praktek perbudakan di negara modern, Hong Kong yang selama ini dianggap sebagai surga bagi buruh migran Indonesia. Bahkan pada awal kasus Erwiana muncul, kala itu BNP2TKI menyerukan agar kasus Erwiana diselesaikan secara kekeluargaan.

Pada tahun ini, Brigpol Rudy Soik, seorang anggota Polri yang jujur dan berintegritas juga mengungkapkan fakta-fakta perdagangan manusia di NTT yang selama puluhan tahun dibiarkan berlangsung. Dan karena keberaniannya ini, Brigpol Rudy dikriminalisasi dan ditahan karena kasus yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan kasus perdagangan manusia yang diungkap olehnya. Semestinya Mabes Polri menjadikan kasus perdagangan manusia di NTT sebagai pintu masuk untuk mengungkapkan praktek *trafficking* dan sindikatnya dalam penempatan buruh migran secara nasional.

Tahun 2014 juga tahun yang penuh duka, setidaknya empat kali kecelakaan kapal yang menenggelamkan buruh migran dan ABK. Setidaknya 146 buruh migran, termasuk ABK meninggal tenggelam di lautan baik di selat Malaka Malaysia maupun di selat Bering Rusia. Dan hingga kini upaya investigasinya masih belum tuntas.

Di penghujung tahun 2014, lagi, PRT migran Indonesia asal Batang Jawa Tengah menjadi korban pembunuhan secara sadis oleh majikannya, bahkan menurut beberapa sumber korban dimutilasi secara sadis di Malaysia. Kondisi ini menggambarkan bahwa belum ada upaya serius dari pemerintahan SBY selama 10 tahun berkuasa untuk memerdekakan PRT migran dari kondisi ini. Kondisi buruk ini mau tidak mau harus menjadi tanggungjawab dari pemerintahan Joko Widodo merealisasikan komitmen Nawacita “negara hadir” dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya.

Warisan pekerjaan dari pemerintahan SBY yang harus menjadi tanggung jawab pemerintahan Jokowi, antara lain adalah:

1. Menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa buruh migran dan PRT migran, seperti kasus kekerasan seksual, perkosaan, penyiksaan, perdagangan manusia, dll.
2. Menyelamatkan 262 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara.
3. Melindungi dan memastikan hak-hak buruh migran yang tidak berdokumen yang rentan menghadapi razia, penangkapan, dan pengusiran.

Secara menyeluruh, berikut adalah gambaran kondisi buruh migran pada tahun 2014:

1. Pelanggaran HAM (penyiksaan, gaji tidak dibayar, perkosaan, PHK, dll) berjumlah 15.345 orang.
2. Terancam di razia, di tangkap, dan dideportasi di Malaysia berjumlah 320.000 orang.
3. Korban perbudakan di berbagai negara berjumlah 714.300 orang.
4. Terancam hukuman mati berjumlah 262 orang.
5. Meninggal di lautan berjumlah 146 orang.

Dengan demikian, total jumlah kasus buruh migran sepanjang 2014 dialami oleh 1.050.053 buruh migran Indonesia.

Hingga saat ini Migrant CARE masih menginventarisasi data-data kematian buruh migran Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik yang selama ini datanya sulit diakses karena ketertutupan informasi, baik dari otoritas setempat maupun dari perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Atas situasi tersebut, Migrant CARE mendesak agar:

1. Pemerintah Indonesia segera menuntaskan revisi UU Buruh Migran yang selama ini menjadi payung hukum bagi terjadinya praktek eksploitatif bagi buruh migran.
2. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga dan Protocol 2014 dari Konvensi ILO tentang Kerja Paksa serta segera mensyahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
3. Pemerintah Indonesia juga terbuka pada masyarakat sipil Indonesia dan masyarakat internasional untuk mewujudkan kesadaran publik mengakhiri perbudakan modern dan mendesak pada sektor untuk menerapkan norma dan standar bisnis yang menghormati hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender serta kelestarian lingkungan.

Selain itu, secara khusus Migrant CARE mendesak kepada Pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo untuk membuat peta jalan mengakhiri praktek perbudakan modern terhadap buruh migran Indonesia dengan:

1. Mengakhiri era penempatan buruh migran yang berbasis pada monopoli PPTKIS dan berbiaya tinggi dan menggantinya dengan tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran sebagai aktivitas pelayanan publik.
2. Mengimplementasikan ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya sebagai instrument diplomasi, panduan pembaharuan legislasi dan panduan kerja institusi negara yang terkait masalah penempatan dan perlindungan buruh migran.
3. Mengakhiri praktek-praktek kriminalisasi terhadap semua pihak yang selama ini aktif dalam membela dan membongkar sindikat perdagangan orang, khususnya Brigpol Rudy Soik yang saat ini ditahan dan diadili.

Jakarta, 18 Desember 2014



MIGRANT CARE
Perhimpunan Indonesia
untuk Buruh Migran Berdaulat

MAMPU

Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan

www.migrantcare.net

NEWSLETTER

MIGRANT CARE

EDISI JULI - DESEMBER 2014

ISSN 2066-4361

